



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

AMPA, 1985, *Bagi Hasil Di Hindia Belanda*, yayasan obor Indonesia,
Jakarta.

Anwar Syaiful dan Dyah Tjahyandari S, 2014, Dasar-Dasar Ilmu Tanah,
Jurnal Hukum, Universitas Terbuka, Jakarta.

Azwar Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung

Erwiningsih Winahyu, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total
Media, Yogyakarta.

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum
Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Gautama Sudargo, 1993, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Citra
Aditya Bakti, Bandung.

Hadikusumah Hilman, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum adat Indonesia*, CV.
Mandar Maju, Bandung.

Harsono Boedi, 2008, *Hukum Agraria Nasional (sejarah pembentukan
Undang-Undang pokok Agraria isi dan pelaksanaanya)*, Djambatan,
Jakarta.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

TINJUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (STUDI KASUS DI
DUSUN SANGGRAHAN,
TIRTOADI, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
REVANY RIZKY AMALIA, Alifa Prasasti Rahmalingrum S.H., M.H.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Koesnoe M., 1992, *Hukum adat sebagai Model hukum*, Bandar Maju,
Bandung.

Marzuki Mahmud Peter. 2005, *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta.

Parlindungan A.P., 1991, *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu
Studi Komparatif)*, Mandar Maju, Bandung.

Saleh Wantjik K., 1987, *Hak anda Atas Tanah*, Ghalia, Jakarta.

Santoso Urip, 2017, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan dan Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun*, kencana, Jakarta.

Soekanto Soerjono dan Soleman B. Taneko, 1981, *Hukum Adat Indonesia*.
Rajawali Indonesia, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1988. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*.
Ramadja Karya. Bandung.

_____, 2015 , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas
Indonesia Press, Jakarta.

Soekanto Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta, Bandung.

Suriasumantri S. Jujur, 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan
Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia,
Jakarta.

Wignjodipoero Soerojo R., 1985, *Pengantar dan Asas-Asas*, Djambatan,
Jakarta.



B. Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1934)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2043)

Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang
Penetapan Perimbangan Khusus Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi
Hasil.

Keputusan Menteri Muda Agraria Nomor Sk. 322/Ka/1960 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 1960 tentang
pedoman pelaksanaan undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang
perjanjian bagi hasil.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor
211 Tahun 1980 No. 714/Kpts/Um/9/1980.

C. Skripsi, Jurnal dan Tesis

Dian Anastasia, 2014, Pelaksanaan Bentuk Tertulis Dan Imbalan
Pembagian Hasil Dalam Praktek Bagi Hasil tanah pertanian Di
Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Klaten, *Skripsi*, Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Salim dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada
Tesis dan Dissertasi, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press,
Jakarta, Hlm. 375.



Ginting Malem. 2006. *Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian* Studi di Kabupaten Karo 1. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.

Harun, 2017, Reformulasi Kebijakan Konversi Lahan Pertanian: Potensi, Dampak dan Revitalisasi Fungsi di Kabupaten Sukoharjo, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

Hayati Mimi dan Martina, 2017, Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, *Jurnal Sains Pertanian*, Universitas Almuslim.

Ramadhan Widi Gilang, 2013, Perjanjian Bagi Hasil di atas tanah bengkok berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 di desa katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Septiana Erlis Nurbani dan Salim, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 375.

Wahyuningsih Tri, 2011, Sistem bagi hasil maro sebagai upaya mewujudkan solidaritas masyarakat, *Jurnal Hukum*, Conservation University, Tegal.

D. Internet

Admin Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2018, Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian, 2015 – 2017, <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/17%2000:00:00/1314/persentase-tenaga-kerja-informal-sektor-pertanian-2015--2017.html> diakses pada tanggal 30 Agustus 2018 pukul 18.34 WIB.

KBBI,2016, *Online*, <http://kbbi.web.id/online>, diakses pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 15.40 WIB